

UPAYA DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA MELALUI JALUR MULTILATERAL DAN BILATERAL

Asep Setiawan^{1*}, Debbie Affianty², Nurul Fitralaila Tanjung³

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, 15419

²Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, 15419

³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, 15419

*asep.setiawan@umj.ac.id

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 secara global yang diumumkan WHO 11 Maret 2020 telah mendorong berbagai negara mencari vaksin untuk kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia melakukan diplomasi vaksin dalam upaya mendapatkan vaksin untuk kesehatan penduduknya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi kesehatan global dalam tata kelola kesehatan global. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memanfaatkan jalur multilateral dalam upaya mendapatkan vaksin COVID-19 di forum-forum internasional terutama lembaga yang dikoordinasikan WHO. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi bilateral untuk menjalin kerjasama pengadaan vaksin untuk kepentingan di dalam negerinya.

Kata kunci: diplomasi, vaksin, kesehatan, COVID-19, pandemi

ABSTRACT

The global COVID-19 pandemic declared by WHO on March 11, 2020 has prompted various countries to seek vaccines for their national interests. This study examines how Indonesia conducts vaccine diplomacy in an effort to obtain vaccines for the health of its population. A qualitative approach was used in this study with data collection techniques, literature study and interviews. The concept used in this research is global health diplomacy in global health governance. This study found that Indonesia conducted multilateral track diplomacy in an effort to obtain a COVID-19 vaccine in international forums, especially institutions coordinated by WHO. In addition, Indonesia also took bilateral diplomacy to establish cooperation in the procurement of vaccines for its domestic interests.

Keywords: diplomacy, vaccine, health, COVID-19, pandemic

1. PENDAHULUAN

Vaksin disebut sebagai “game changer” dalam hubungan internasional masa pandemi COVID-19. Disebut sebagai “game changer” karena akan mengubah situasi global, karena

negara yang tertinggal dalam vaksinasi akan berpengaruh pada keamanan kesehatan dan selanjutnya berdampak ke negara lain. Vaksin tidak hanya sebagai obat pembendung penyebaran COVID-19, namun juga sebagai bagian dari elemen keamanan kesehatan

masyarakat dan sekaligus keamanan nasional. Oleh karena itu vaksin menjadi unsur penting dalam membangun kedaulatan nasional.

Pandemi COVID-19 telah menjadi isu global karena mewabah di seluruh dunia. WHO menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai wabah dunia pada 11 Maret 2020 setelah muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Desember 2019. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai 5 Juli 2021 menunjukkan sudah 183.560.151 kasus positif COVID-19 dengan jumlah yang meninggal sampai 3.978.581 orang. Vaksinasi di tingkat global mencapai 2.998.941.529 dosis pada tanggal 4 Juli 2021. Sedangkan Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 dan data WHO 30 Juni menunjukkan terdapat 1.178.272 kasus positif dan 58.491 orang meninggal dan 1.880.413 sembuh.

Saat pandemi berkecamuk, dilaporkan mulai awal tahun 2020, gagasan perlunya vaksinasi dalam menghadapi COVID-19 telah menjadi pandangan umum internasional. Dan dalam konteks itulah setidaknya di dunia ini terbagi dua kelompok negara, yakni sebagai penyedia vaksin dan konsumen vaksin. Bagi negara produsen, vaksin digunakan tidak hanya sebagai instrumen dalam politik luar negeri tetapi juga untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan bagi negara konsumen, diplomasi merupakan upaya membuka akses kepada vaksin di lembaga global dan negara-negara penyedia vaksin.

Selain itu, bagi negara yang memiliki dan memproduksi vaksin dapat berarti mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. Vaksin juga disebut sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan perdamaian. Vaksin juga instrumen bagi terjadinya kolaborasi internasional yang mampu menjaga kesehatan global (Winchester dkk: 2017). Sebagian lagi menyebutkan vaksin dalam rangka diplomasi sebagai *soft power* baik dalam peran bantuan kemanusiaan, kerja sama, maupun untuk memperluas (*sphere of influence*) dan berperan sebagai penguasaan secara geopolitik. (Gauttam et.al: 2020). Namun, dalam kasus China muncul pendapat bahwa negara ini memandang diplomasi kesehatan ini sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai aktor ekonomi dan politik yang semakin penting di dunia internasional.

Kalau dalam konteks Indonesia, maka akses kepada forum multilateral adalah untuk mendapatkan vaksin dalam menjaga kesehatan nasionalnya. Indonesia berada dalam posisi sebagai konsumen vaksin untuk keamanan kesehatan nasionalnya. Oleh karena itulah maka negara seperti Indonesia melakukan diplomasi untuk mendapatkan akses kepada para penyedia vaksin baik melalui jalur diplomasi, jalur bilateral, jalur multilateral dan jalur publik.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya diplomasi vaksin Indonesia pada saat pandemi berkecamuk di dunia. Tujuannya untuk mengetahui mengapa Indonesia melakukan diplomasi vaksin dan bagaimana cara melakukan vaksin diplomasi ini.

2. TINJAUAN LITERATUR

Untuk mengetahui upaya diplomasi vaksin Indonesia, perlu menjelaskan pengertian istilah mengenai diplomasi kemudian baru apa yang disebut diplomasi vaksin. Sedikitnya terdapat tiga pengertian dari diplomasi. Pertama, diplomasi merujuk kepada tindakan dan upaya mewakili satu negara di negara asing dan dalam perundingan internasional. Kedua diplomasi terkait dengan kebijakan eksternal sebuah negara, sebuah pemerintahan. Ketiga, diplomasi bagian dari ilmu politik yang memperhatikan hubungan internasional.

Dari pengertian itu tampak itu diplomasi tingkat negara masih menjadi penting meskipun sudah berkembang adanya diplomasi multi jalur yang melibatkan masyarakat. Dalam pengertian Petiteville dan Placidi-Frot (2020) diplomasi multilateral dilakukan sebuah negara terutama berkaitan dengan masalah perang dan damai, hak asasi manusia, perdagangan dan lingkungan. Dan diplomasi multilateral ini biasanya berlangsung di berbagai organisasi internasional.

Pannier (2020) menyebut hubungan bilateral ini merupakan landasan dasar dari hubungan internasional. Peran dari hubungan bilateral ini dalam diplomasi adalah memajukan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Diplomasi bilateral masih disebut sebagai instrumen terbaik dalam membela kepentingan sebuah negara baik dalam

perdagangan dan investasi maupun mempromosikan citra dan budaya negara.

Dengan demikian diplomasi jalur multilateral dan bilateral penting dalam memajukan kepentingan nasional sebuah negara, termasuk dalam isu kesehatan global dalam hal ini diplomasi vaksin corona. Menurut Aleksa Filipovic yang merujuk pendapat Anna Kobierecka and Michal Marcin Kobierecki, bahwa diplomasi vaksin corona saat pandemi COVID-19 khususnya berkenaan dengan diplomasi publik China dan kegiatan internasional China berupa pendampingan dan bantuan terhadap negara lain dalam menghadapi pandemi.¹ Disebut pula bahwa diplomasi virus corona merupakan istilah merendahkan yang dialamatkan ke China untuk memanfaatkan krisis global untuk tujuan politik. Namun, Filipovic menyebut, diplomasi virus corona ini untuk mengejar tujuan politik luar negeri melalui pengembangan citra positif sebagai penyedia bantuan dan mitra terpercaya. Kemudian muncullah istilah lebih populer yakni "diplomasi vaksin".

Diplomasi vaksin ini seperti yang disebut Filipovic bagian dari strategi kehumasan China yang bertujuan untuk "mengimbangi persepsi negatif negara ini serta menghadirkan diri sebagai warga masyarakat global yang bertanggung jawab". Namun Peter J Hotez menyatakan bahwa diplomasi vaksin sudah berlangsung sejak abad ke-18 dan terus berkembang pada abad ke-21. Istilah ini dalam dunia modern merujuk kepada "hampir semua aspek diplomasi kesehatan global yang mengandalkan penggunaan atau pemberian vaksin dan mencakup hal-hal penting kerja Aliansi GAVI, serta WHO, Gates Foundation, dan organisasi internasional lainnya yang penting". Hotez juga menjelaskan bahwa diplomasi vaksin ini sebagai intervensi kemanusiaan dan perannya yang terbukti dalam menengahi penghentian permusuhan dan bahkan gencatan senjata selama kampanye vaksinasi.

Diplomasi vaksin ini hadir dalam kerangka diplomasi kesehatan global. Lee dan Smith (2020) memaparkan sejumlah pengertian dari diplomasi kesehatan global. Fauci (2007) yang dikutip Lee dan Smith menyatakan bahwa

diplomasi kesehatan global adalah memenangkan hati dan pikiran masyarakat di negara-negara miskin dengan melakukan ekspor peralatan kesehatan, keahlian dan personil untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Bond (2008) seperti dilansir Lee dan Smith, istilah ini merujuk kepada pembangunan kepercayaan dan negosiasi yang saling menguntungkan dalam konteks tujuan kesehatan global. Sedangkan Novotny dan Adams (2007), tulis Lee dan Smith, adalah kegiatan perubahan politik yang memenuhi dua tujuan, yakni memperbaiki kesehatan global sekaligus menjaga dan mempertahankan hubungan internasional, khususnya di kawasan konflik dan lingkungan yang miskin sumber daya.

Sementara itu, lebih detail lagi, Ilona dkk melukiskan diplomasi kesehatan global merujuk kepada proses negosiasi multi level dan multi aktor yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global di forum kesehatan dan non kesehatan. Ditambahkan bahwa, diplomasi kesehatan global ini merupakan diplomasi baik secara sistem organisasi maupun metode kerjanya. Diplomasi ini selalu bersifat politik dan dilakukan melalui berbagai saluran. Selain itu, dijelaskan bahwa para diplomat yang melakukan diplomasi kesehatan ini mengupayakan tujuan dari politik luar negerinya dan lebih umum lagi melindungi kepentingan nasionalnya di luar negeri. Pengertian-pengertian itu merujuk kepada isu kesehatan sebagai instrumen dalam melakukan kolaborasi antar negara di dunia. Isu kesehatan ini menggunakan perangkat keras berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan serta perangkat lunak berupa bantuan keahlian.

Ilona menjelaskan bahwa dalam *global health diplomacy* ini termasuk diplomasi vaksin terdapat tujuh dimensi. Pertama, negosiasi untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan saat berhadapan dengan kepentingan - kepentingan lain. Kedua, membentuk mekanisme tata kelola dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Ketiga, menciptakan aliansi untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Keempat, membangun dan mengelola hubungan donor dan pemangku kepentingan. Kelima, merespon krisis kesehatan publik. Keenam, meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan dan kesejahteraan. Ketujuh, memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan

Dalam konteks kajian diplomasi vaksin Indonesia, dapat dikatakan tidak merujuk kepada pemberian bantuan tetapi upaya untuk mendapatkan akses vaksin untuk keamanan kesehatan negaranya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa diplomasi vaksin Indonesia lebih merupakan upaya diplomasi tradisional untuk mendapatkan vaksin dengan cara bilateral dan multilateral melalui forum-forum internasional dan bilateral.

Diplomasi vaksin di sini dipandang sebagai bagian dari instrumen politik luar negeri dalam mencapai kepentingan nasional yang dalam hal ini adalah keamanan dalam negeri berupa Kesehatan bangsa Indonesia melalui akses vaksin COVID-19 karena tidak mampu memproduksinya.

Dalam pengertian I Gede Wahyu Wicaksana, diplomasi vaksin ini bagian dari diplomasi kesehatan global untuk tiga tujuan krusial; 1) berpartisipasi dalam formulasi kebijakan global yang berlangsung di lembaga-lembaga dunia terutama WHO, 2) mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap suplai bahan baku obat serta vaksin, alat-alat kesehatan, teknologi dan asistensi teknis yang dibutuhkan dalam mitigasi krisis COVID-19, dan 3) meresolusi persoalan-persoalan non-teknis yang berefek negatif terhadap upaya menangani wabah penyakit virus corona yang bersifat transnasional.

Sebenarnya, istilah diplomasi vaksin ini pernah terjadi berkaitan dengan Indonesia tahun 2006, namun dalam konteks yang berbeda. Saat itu Kementerian Kesehatan menarik diri dari jaringan WHO untuk berbagi contoh virus flu burung H5N1. Penarikan diri disebut sebagai pembalasan atas informasi bahwa sebuah perusahaan Australia mengembangkan vaksin berdasarkan contoh Indonesia, tanpa mendapatkan ijin atau pemberitahuan. Sedangkan Indonesia yang belum memiliki teknologi pengembangan vaksin tidak mendapatkan apa-apa. Dengan demikian konteks diplomasi vaksin lebih bersifat aksi protes terhadap dunia karena berbagai negara menggunakan contoh virus flu burung Indonesia untuk membuat vaksinnya dan dijual ke dunia internasional termasuk Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disebut Lamont (2015) sebagai pengumpulan data dan teknik analisis atau strategi yang menyandarkan kepada pengumpulan dan analisis data non-numerik.² Pemilihan metode ini kata Creswell (2014) dikarenakan penelitian akan fokus untuk mengeksplorasi dan memahami makna (meaning) masalah sosial individual dan kelompok. Teknik pengumpulan data untuk penelitian dengan studi dokumen tertulis, artikel jurnal, buku dan juga wawancara dengan diplomat, pejabat Kementerian Kesehatan RI dan akademisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Jalur Multilateral

Diplomasi multilateral bidang kesehatan dimana diplomasi vaksin termasuk di dalamnya telah diintegrasikan kedalam politik luar negeri Indonesia. Sejak 2006, Indonesia bekerjasama dengan Perancis, Norwegia, Brasil, Afrika Selatan, Thailand dan Senegal dalam *Global Health and Foreign Policy Initiative* (GHFPI).³ Sejak terbentuknya itu, GHFPI mensponsori berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan penyakit menular, yaitu: Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/108 Tahun 2009 tentang pengendalian *emerging infectious disease* dan SDM kesehatan; Resolusi No. 65/95 Tahun 2010 tentang tata kelola global dan pencapaian MDGs; Resolusi No. 66/115 Tahun 2011 mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan bencana alam; Resolusi No. 67/81 Tahun 2013 mengenai *Universal Health Coverage* (UHC); serta Resolusi No. 68/98 Tahun 2014 mengenai kemitraan global.

Salah satu pandangan mengenai diplomasi vaksin melalui multilateral meski tidak memiliki vaksin adalah diplomasi vaksin ini juga merupakan sebuah tanggung jawab global untuk mewujudkan misi global *peace and prosperity*. Dalam posisi ini, Indonesia ikut menciptakan tema perdamaian dunia dan kesejahteraan global. Indonesia dalam forum multilateral ini

menciptakan apa yang disebut sebagai norm setting.⁴ Norma-norma yang diajukan Indonesia antara lain perlunya semua negara mendapatkan vaksin. Selain itu diupayakan langkahnya agar semua negara mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari ancaman yang datang dari lintas batas negara.

Melalui diplomasi multilateral, Indonesia menyuarkan akses vaksin setara bagi semua. Indonesia mendukung penghapusan paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Indonesia memandang ini merupakan salah satu jalan kerjasama internasional yang meratakan jalan bagi akses vaksin setara bagi semua. Pesan moral ini menjadi landasan Indonesia untuk aktif di dunia internasional, juga karena Indonesia menyadari tidak mampu memproduksi vaksin COVID-19 dalam waktu dekat.

Inilah yang ditegaskan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia ingin memberikan kontribusi terhadap pengadaan alat diagnostik, terapeutik maupun pengadaan vaksin. Ini menunjukkan bahwa dengan posisi Indonesia tidak memiliki kekuatan besar di bidang kesehatan maka fokusnya jelas memperjuangkan kepentingan internasional terutama negara-negara sedang berkembang untuk mendapatkan kebutuhan akan produk kesehatan. Diplomasi kesehatan Indonesia dirumuskan dalam kalimat meratakan jalan dan membuka akses terhadap produk kesehatan.

Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki penguasaan terhadap vaksin termasuk vaksin COVID-19, jalan yang ditempuh adalah memberikan pengaruh dalam *global health governance* atau tata kelola kesehatan global. Diplomasi vaksin Indonesia dengan kata lain lebih kepada membuka akses kepada pasar produsen vaksin. Instrumen yang digunakan adalah melakukan diplomasi di WHO dan lembaga internasional yang mengelola Kesehatan dunia. Diplomasi vaksin Indonesia bertujuan membuka akses kepada pasar produsen vaksin, membuka jalan dan menangani berbagai hambatan.

Diplomasi multilateral Indonesia di bidang kesehatan ini terbagi kedalam tiga organisasi besar yakni COVAX Facility yang dikoordinasikan WHO, GAVI dan CEPI. Indonesia sendiri menjadi anggota COVAX AMC (Advanced Market Commitment) disamping 91 negara lain yang berpenghasilan menengah dan rendah. Dengan menjadi anggota ini maka Indonesia akan mendapat alokasi dua sampai 20 persen dari jumlah penduduk. Di forum inilah Indonesia menjadi ketua bersama dari COVAX AMC Engagement Group saat pandemi ini bersama dengan Kanada dan Ethiopia.

Sebagai *co-chair* ini, Indonesia memiliki tanggung jawab memperjuangkan akses kesetaraan vaksin bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Indonesia menegaskan bahwa kerjasama internasional ini perlu dilakukan dengan pendekatan multi jalur, tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga sektor swasta.⁵ Namun demikian untuk jalur swasta ini, dalam konteks pencarian vaksin masih terbatas.

Salah satu manfaat dari diplomasi vaksin multilateral adalah mendapatkan kepastian vaksin dari COVAX sebesar 20 persen dari total penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia sekitar 170 juta maka 20 persen dari jumlah itu, karena diplomasi vaksin di forum multilateral, mendapat jaminan mendapatkan vaksinasi. Sisanya merupakan upaya Indonesia termasuk nanti dijelaskan dalam diplomasi bilateral.

Penekanan perlunya kerjasama multilateral ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang merepresentasikan sikap Indonesia di forum global. Indonesia menyatakan tata kelola global ini tidak hanya menangani isu kesehatan tetapi juga tantangan di bidang ekonomi, keuangan dan pencegahan wabah COVID-19. Kembali sebagai pintu masuk dalam mengakses vaksin melalui forum global, Indonesia dalam *International Coordination Group on COVID-19 (ICGC)* April 2020 menegaskan bahwa masyarakat dunia perlu mempercayai prinsip-prinsip multilateralisme yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dunia.

Upaya Indonesia dalam mengakses tata kelola Kesehatan dunia digambarkan dengan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin di lembaga tata kelola kesehatan global. Di kancah internasional Indonesia juga mulai aktif menyuarakan sikap pemerintahannya terhadap COVID-19 dengan mengajak aksi solidaritas di PBB. Keaktifan Indonesia tampak dari disahkan Resolusi Majelis Umum PBB “Global Solidarity to Fight COVID-19” tanggal 2 April 2020. Resolusi ini disebut sebagai produk pertama yang dihasilkan oleh PBB terkait virus corona sejak diumumkannya status pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Indonesia bekerjasama dengan Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss untuk meloloskan resolusi di PBB.

Resolusi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam merespons COVID-19. Disalah satu bagiannya, resolusi menyerukan peningkatan kerjasama internasional untuk membendung, menangani dan memberantas pandemi dengan pertukaran informasi, ilmu pengetahuan dan kebijakan serta menerapkan panduan dari WHO. Resolusi juga mendesak PBB agar bekerjasama dengan berbagai anggotanya memobilisasi respon global menghadapi pandemi dan dampaknya di bidang sosial, ekonomi dan keuangan.

Sejak Resolusi dikeluarkan bulan April sampai akhir tahun 2020, kerjasama itu belum terwujud sepenuhnya. Negara-negara yang mengambil prakarsa resolusi itu termasuk Indonesia juga masih belum mampu sepenuhnya mengarah kepada kerjasama dalam memberantas COVID-19 karena memprioritaskan penyelesaian di dalam negeri, dimana jumlah pasien positif meningkat setiap bulannya.

Dengan aktifnya Indonesia di berbagai forum internasional, Djumala mencatat adanya perkembangan baru. Menteri Luar Negeri RI berhasil terpilih sebagai *Co-Chair COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG)* pada pemilihan yang berlangsung secara virtual di Jenewa, 8 Januari 2021. COVAX AMC EG merupakan forum konsultasi yang mempertemukan antara 92 negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. COVAX Facility memiliki target pengadaan vaksin sampai 20 persen dari

populasi setiap negara AMC dan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional.

Dengan Menlu RI menjadi *Co-Chair AMC-EG* bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada. Indonesia memperoleh suara terbanyak, yaitu 41% dari 92 suara negara yang tergabung dalam COVAX AMC. Terpilihnya Indonesia dengan suara terbanyak ini mencerminkan dua hal yaitu: Pertama, merupakan wujud dari kepercayaan dunia internasional, terutama negara berkembang kepada Indonesia; Kedua, merupakan tanggung jawab besar Indonesia bagi terwujudnya kesetaraan akses vaksin bagi semua Negara. Dengan aktifnya Indonesia di kancah diplomasi Kesehatan Indonesia disebut mendapatkan beberapa manfaat yang sesuai dengan kepentingan Nasional.

Sebagai *Co-Chair COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG)* AMC-EG, Indonesia berkontribusi secara signifikan terhadap diskursus dalam COVAX Facility terkait percepatan pengembangan, produksi, dan akses yang merata terhadap vaksin COVID-19. Kepemimpinan Indonesia pada AMC-EG akan memprioritaskan kepentingan nasional, yaitu penyediaan vaksin bagi seluruh negara AMC (92 negara); 2) memastikan pemilihan portfolio vaksin yang baik untuk didistribusikan melalui mekanisme COVAX Facility; 3) memastikan terpenuhinya pasokan dan distribusi dosis hingga 20% secara gratis bagi negara AMC; 4) finalisasi konsep dosis sharing COVAX Facility; dan 5) finalisasi konsep dan prosedur *no-fault compensation* dari COVAX Facility untuk Serious Adverse Event (SAE) yang mungkin terjadi dari dampak vaksin COVAX Facility.

Menlu RI, Retno Marsudi memimpin pertemuan pertama AMC-EG pada tanggal 27 Januari 2021 dan secara tegas dan konsisten kepentingan nasional Indonesia, termasuk menyuarakan prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara “vaccine for all”. Kesetaraan hanya dapat terwujud melalui kerja sama dan solidaritas.

Sebagai perkembangan lebih lanjut, sebanyak 1.113.600 vaksin yang berasal dari perusahaan farmasi Inggris, Astra Zeneca tiba di

Indonesia pada tanggal 8 Maret 2021. Kedatangan vaksin Astra Zeneca melalui skema kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility. Fasilitas tersebut merupakan kerjasama pengembangan vaksin antara Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan GAVI. *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI Alliance) ini menempati posisi penting sebagai aktor *global health*. Hal itu disebabkan lengkap sekali keanggotannya karena terdapat unsur WHO, Bank Dunia, Unicef, pemerintah donor, pemerintah negara berkembang, negara-negara berkembang industri vaksin, negara-negara maju industri vaksin, organisasi masyarakat sipil, individu, CEO GAVI Alliance, Lembaga Riset Kesehatan dan Yayasan Bill dan Melinda Gates.

Selain di forum yang erat kaitan dengan WHO, Indonesia selaku Ketua Pertemuan ke-48 *Industrial Development Board* (IDB) *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mendorong resolusi 48/11 yaitu “UNIDO’s Response to the Covid-19 Pandemic” yang merupakan resolusi UNIDO terkait respon dan mitigasi COVID-19. Resolusi ini menjabarkan 3 (tiga) pendekatan integrasi yaitu: (i) “Prepare and Contain” yaitu tahap pertama untuk menjaga mata rantai produksi, sektor industri dan tenaga kerja dalam upaya mitigasi pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian dan pembangunan ekonomi; (ii) “Respond and Adapt”, yaitu tahap kedua yang mendorong proses adaptasi sektor industri dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan digital economy, serta mendorong solusi dan dukungan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan (iii) “Recover and Transform”, yaitu tahap ketiga menuju pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Selain itu, resolusi 48/11 menyampaikan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global COVID-19.

Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan 108 juta dosis vaksin COVID-19 secara gratis melalui fasilitas COVAX/GAVI.⁶ Secara keseluruhan, total pengadaan vaksin COVID-19 yang sudah kontrak yaitu sebanyak

329.504.000 dosis. Selain kerja sama multilateral dengan COVAX/GAVI, pemerintah juga membeli vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, Novavax sebanyak 50 juta dosis, dan AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis. Indonesia menargetkan penerima vaksin mencapai yaitu 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis. Menurut Budi, jika menghitung berdasarkan kontrak dan potensi yang ada, pemerintah bisa mendapatkan 663.504.000 dosis vaksin Covid-19.

Perhitungan mengenai angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam tempo beberapa tahun sejak 2021 akan mendapatkan vaksinasi meskipun secara konseptual cukup dua pertiga dari jumlah penduduk. Melalui jalur multilateral ini tanggal 8 Mei 2021, Indonesia kembali mendapatkan 1.389.600 dosis. Sedangkan vaksin dari AstraZeneca, 6 Mei telah tiba 55.300 dosis. Total sampai Juni, Indonesia menerima 6.410.500 dosis vaksin dari COVAX Facility atau jalur multilateral (GPRS:2021). Menurut Menlu RI, sampai 8 Mei 2021, Indonesia mengamankan 75.910.500 dosis dengan rincian 68.500.000 dosis dari Sinovac, 6.410.500 dari AstraZeneca dan 1.000.000 dari Sinopharm. COVAX Facility didukung aliansi global vaksin GAVI, WHO, *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI).

Sebagai catatan mengenai pentingnya aktif di forum COVAX Facility ini bagi Indonesia menjadi signifikan karena COVAX Facility ini telah memegang komitmen 1,7 miliar dosis dari kebutuhan total dua miliar dosis pada tahun 2021. Sampai Juni 2021, 63,7 juta dosis telah dikirim melalui COVAX Facility ini ke 124 negara termasuk Indonesia.

Diplomasi di forum multilateral ini, Indonesia juga menggunakan ASEAN sebagai cara menyampaikan kebijakannya dalam tatakelola kesehatan global. Pertemuan antara ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati kesepakatan meningkatkan kerjasama kedua pihak dalam membangun kapasitas personil kesehatan dan bantuan kesehatan melalui USAID.

Jejak diplomasi vaksin di forum multilateral di tingkat ASEAN sudah dilakukan

Indonesia. Di tingkat ASEAN ini terdapat sejumlah forum yang menangani Kesehatan, dimana Indonesia aktif dalam *ASEAN Health Clusters* (AHC) yang terdiri dari 1) ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle; 2) ASEAN Health Cluster 2: Responding to All Hazards and Emerging Threats; 3) ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health Systems and Access to Care; dan 4) ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety.

Diplomasi Indonesia untuk mendorong kerjasama ini tampak dalam pertemuan ASEAN. Seperti dijelaskan Haripin (2020) dalam kesempatan *25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC)* April 2020, Menlu Indonesia menyampaikan empat poin penting. Pertama, Indonesia mendorong implementasi hasil pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dan ASEAN+3. Kedua, Indonesia mengajukan usul agar kesepakatan "Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak" dibahas dalam forum KTT ASEAN+3. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk pekerja migran, dengan memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, Indonesia mengusulkan pengumpulan ASEAN COVID-19 Response Fund yang berasal dari ASEAN Development Fund serta ASEAN+3 Cooperation Fund untuk membiayai pembelian alat-alat medis dan kebutuhan lainnya.

Dengan model pendekatan multilateral melalui forum internasional, Indonesia tidak hanya dapat mengetahui pengaturan vaksin di tingkat dunia namun juga dapat memanfaatkan untuk kepentingan nasionalnya. Ketidakmampuan dalam memproduksi vaksin ini dapat ditutupi dengan upaya di forum multilateral. Dan tidak hanya mendapatkan alokasi vaksin yang diperlukan namun juga dapat mendorong dunia memperhatikan negara-negara miskin agar dapat alokasi minimal. Argumentasi dari Indonesia bahwa pandemi ini bersifat global maka lembaga kesehatan dunia perlu memperhatikan kepentingan negara miskin karena kalau tidak ada alokasi vaksin maka pandemi tidak akan cepat dibendung karena dunia sudah dalam tingkat globalisasi yang kuat di bidang transportasi misalnya.

Kebijakan Indonesia untuk memasuki forum multilateral ini tidak jauh dari pemikiran Bertorelli. Instrumen untuk diplomasi kesehatan global ini mulai dari yang legalitasnya formal, kolaboratif, operatif sampai dengan advisory. Keaktifan Indonesia di sejumlah lembaga multilateral ini tidak hanya membantu dunia merumuskan bagaimana vaksin dikelola dan distribusikan tetapi juga membantu Indonesia mendapatkan akses kepada penyediaan vaksin dan prioritas dalam pengiriman vaksin. Namun demikian diplomasi kesehatan Indonesia menghadapi COVID-19 ini masih belum optimal karena antara lain kurang gagasan utama karena hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saja, penggunaan sumber daya yang konvensional dan Kementerian Luar Negeri tidak menjadi aktor utama dalam diplomasi Kesehatan.

Diplomasi Jalur Bilateral

Indonesia memandang tidak cukup melakukan diplomasi kesehatan global dalam bidang vaksin ini melalui forum multilateral namun juga mencari peluang di dalam hubungan bilateral. Yang pertama dilakukan adalah melalui instrumen bilateral negara ke negara-negara yang sudah terbangun komunikasinya selama ini. Yang kedua melalui hubungan berbasis bisnis secara bilateral antar lembaga bisnis, dalam hal ini badan usaha milik negara di Indonesia dengan produsen vaksin swasta di mancanegara. Dalam konteks melibatkan lembaga usaha meskipun milik negara maka kegiatan diplomasi sudah melibatkan multi aktor, tidak hanya aktor negara.

Inilah yang kemudian dalam negosiasi awal sebelum produksi vaksin ini, Indonesia sudah membuka saluran negara dengan negara dan bisnis dengan bisnis. Data-data menunjukkan jalur bilateral ini tampak dari berbagai komitmen yang dilakukan Indonesia dengan mitranya dalam mengadakan vaksin ini.

Diplomasi bilateral Indonesia melalui kerjasama dengan AstraZeneca mendapatkan jaminan 100 juta vaksin virus corona pada tahun 2021. Diplomasi bilateral ini mendapatkan peluang karena Indonesia sempat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga akses kepada Inggris lebih pada posisi menguntungkan. Indonesia juga mengumumkan

dengan China, Korea, Uni Emirat Arab, berdasarkan bilateral di jalur resmi. Sedangkan di jalur lembaga bisnis, Indonesia memfasilitasi dengan berbagai perusahaan produsen vaksin. Diplomasi vaksin dalam konteks bilateral ini fokus secara nyata dan kadang-kadang bersifat transaksi komersial pada umumnya.

Kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2020 antara lain melakukan penyusunan Nota Kesepahaman mengenai kerja sama dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pertukaran data dan informasi mengenai regulasi dan best practices vaksin COVID-19. Selama tahun 2020, Indonesia telah menyepakati kerja sama di bidang kesehatan dengan Australia, Inggris, Jepang yang mana salah satu bidang yang dikerjakan samakan berkaitan dengan penanganan penyakit menular yang didalamnya termasuk COVID-19.

Kerjasama secara bilateral ini yang juga berjalan selama pandemi menyangkut upaya kemandirian produksi farmasi dalam pengadaan vaksin. Indonesia berharap bahwa Bio Farma dapat menjadi perusahaan Life Science di tingkat internasional dan memiliki daya saing global. Hubungan bilateral diplomasi kesehatan diarahkan untuk mendapatkan kerjasama riset, alih teknologi dan peningkatan kapasitas peneliti Biofarma (Taher:2021).

Diplomasi jalur bilateral dilakukan Indonesia dengan langkah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, berkeliling ke berbagai negara seperti China, Inggris dan Swiss untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat. Indonesia mengklaim telah mendapatkan 290 juta sampai 340 juta dosis sampai akhir tahun 2021 (Septiari:2020). Menlu Retno Marsudi menyebutkan perkembangan terakhir ini merupakan hasil kunjungan ke China dan Uni Emirat Arab. Di China, kesepakatan antara BUMN Bio Farma dengan Sinovac Biothec menyediakan 50 juta dosis dari November 2020 sampai Maret serta prioritas pengiriman sesudahnya.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga melakukan kontak dengan Sinopharm dan CanSino Biologics. Sedangkan lawatan ke Abu Dhabi akhir 2020 juga melahirkan kesepakatan antara BUMN Kimia Farma dan Indo Farma dengan Group 42 (G-42) Health Care.

Perusahaan dari Uni Emirat Arab ini terlibat dalam penelitian, pengembangan dan distribusi pengujian dan perawatan COVID-19. Diplomasi ke China sebenarnya merupakan respon terhadap bantuan Indonesia ke Wuhan ketika awal COVID-19 berkecamuk di negara itu.

Setidaknya terdapat empat kerjasama bilateral dalam pencarian vaksin COVID-19 ini. Pertama yang tampak karena juga melakukan uji coba tahap klinis di Indonesia adalah kerjasama Indonesia-China. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dengan Menteri BUMN, Erick Tohir dating ke Tiongkok untuk menetapkan kerjasama kedua negara dalam produksi vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan produksi tahun 2021 (Kemlu:2020). Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu China Wangyi serta melihat perusahaan farmasi, yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino.

Kedua pihak juga menyepakati essential business travel corridor arrangement bagi pelaku bisnis dan perjalanan kedinasan secara aman. Tiongkok merupakan negara ketiga, setelah sebelumnya Indonesia menjalin pengaturan ini dengan UAE dan Korsel. Dalam pertemuan itu, terjadi penandatanganan duaperjanjian kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac untuk penyediaan 40 juta dosis vaksin bagi Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021, dan prioritas penyediaan vaksin oleh Sinovac bagi Bio Farma periode April – Desember 2021.

Dari pertemuan tersebut, tampak bahwa kebijakan Indonesia memanfaatkan peluang secara pragmatis untuk memanfaatkan teknologi kesehatan yang maju di China untuk kepentingan dalam negeri, yakni menjaga kesehatan warga negara melalui vaksinasi. Langkah Indonesia itu menunjukkan bahwa ketika peluang kerjasama itu dapat menguntungkan untuk memperoleh vaksin tanpa harus melakukan investasi penelitian, maka untuk kepentingan dalam negeri yakni kesehatan publik langkah itu ditempuh Indonesia.

Dalam melihat kerjasama internasional ini, menarik juga disinggung mengenai kerjasama Indonesia dan Korea Selatan saat COVID-19. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini dilakukan melalui perusahaan PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan asal Korea

Selatan, yakni Genexine, Inc. Genexine Inc adalah perusahaan obat biologi dan bioteknologi yang terdaftar di bursa Korea Selatan. Kalbe dan Genexine sepakat untuk melakukan uji klinis GX-19 di Indonesia, yakni pengembangan vaksin DNA terhadap virus Corona baru oleh konsorsium dengan Genexine, Binex, the International Vaccine Institute (IVI), GenNBio, the Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), dan Pohang University of Science & Technology (POSTECH) (cetak miring). Kalbe Farma sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan Genexine Inc, membentuk PT Kalbe Genexine Biologic (KGBio), sebuah perusahaan joint venture untuk mengembangkan dan membuat bahan baku obat-obatan bioteknologi di Indonesia.

Faktor yang mendukung keberhasilan kerjasama bilateral seperti dengan Korea Selatan dan Jepang adalah sikap pro aktif kedua negara terhadap Indonesia. Kedua negara ini memiliki hubungan ekonomi yang luas sehingga kedua negara menawarkan berbagai bantuan kesehatan. Dalam berbagai tingkat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan China, Inggris dan Amerika Serikat tidak lepas dari keterbukaan dan kepentingan negara tersebut ke Indonesia.

Dukungan internasional sebagai bagian dari keberhasilan hubungan bilateral ini terbukti dengan mengalirnya bantuan internasional mencapai lebih dari \$135 juta dolar. Indonesia juga mendapat dukungan dari 11 pemerintahan asing, 12 organisasi internasional, dan 97 lembaga non pemerintah berupa masker, alat rapid test, PCR test, mobil x-ray, ventilator dan alat kesehatan lain

Dalam konteks kerjasama bilateral Indonesia-China misalnya, berbagai kepentingan China terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempercepat realisasi pengiriman vaksin Sinovac ke Indonesia dalam jumlah besar. Amerika Serikat Juli 2021 menyatakan akan mengirimkan empat juta dosis Moderna ke Indonesia. Ini juga merupakan sebuah langkah karena kepentingan AS cukup besar di Indonesia. Namun langkah AS ini bagian dari persaingan secara geopolitik di masa pandemi ini dengan China.

5. KESIMPULAN

Diplomasi vaksin Indonesia menyandarkan pada konsep perlunya kesehatan bagi semua orang di seluruh dunia baik negara kaya maupun miskin. Indonesia menyebutnya *health for all*. Oleh karena itu sejak awal Indonesia memainkan perannya di berbagai lembaga internasional untuk membawa kepentingan semua orang tanpa melihat besar dan kecilnya negara itu. Dengan slogan kesehatan untuk semua itulah, Indonesia yang tidak memiliki kemampuan dan teknologi memproduksi obat vaksinasi COVID-19, masuk melalui lembaga multilateral seperti PBB dan WHO.

Untuk mewujudkan konsep kesehatan untuk semua dan akses vaksin bagi semua negara, Indonesia melakukan diplomasi multilateral di berbagai forum internasional. Diplomasi multilateral Indonesia di bidang kesehatan ini terbagi kedalam tiga organisasi besar yakni COVAX Facility yang dikoordinasikan WHO, GAVI dan CEPI. Melalui tiga lembaga inilah, Indonesia berupaya menempati posisi kepemimpinan sehingga dapat menyuarakan kepentingan internasional khususnya negara sedang berkembang. Dari forum multilateral inilah Indonesia mendapatkan akses virus secara gratis sekaligus membantu berbagai negara dalam mendapatkan virus, setidaknya sebagian dari jumlah penduduk sebuah negara.

Diplomasi bilateral Indonesia melengkapi langkah melalui berbagai forum internasional. Diplomasi bilateral ini mengarah kepada beberapa negara yang berpotensi kerjasama dalam pengembangan vaksin sekaligus pembelian vaksin. Dengan model bilateral dipimpin oleh aktor negara, Indonesia memiliki komitmen dari produsen vaksin seperti China. Vaksin asal China ini menjadi fokus Indonesia dalam kerjasama bilateral karena selain bisa mendapatkan produk secara besar-besaran, kepentingan China ke Indonesia juga memudahkan hubungan dalam diplomasi Kesehatan. Diplomasi bilateral ini terbuka kesempatannya karena juga beberapa negara

besar seperti Amerika Serikat dan Jepang mengulurkan bantuan ke Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan dengan bantuan hibah FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 103/ F. 1-UMJ/ II/ 2021

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, Wiku, Anung Sugihantono, Odo RM Manuhutu, Putri Viona Sari, Sudeepa Abeysinghe. (2019). Indonesia and global health diplomacy: a focus on capacity building, *The Lancet Global Health* .Volume 7, Issue 2.

Balzacq, Thierry, Frederic Charillon and Frederic Ramel.(2020). Introduction: History and Theories of Diplomacy. Dalam Thierry Balzacq, Frederic Charillon and Frederic Ramel. *The Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*. Cham: Palgrave Macmillan.

Bortorelli, Ebony, Steven A. Solomon and Nick Drager. (2013). Instruments of Health Diplomacy. Dalam *Global Health Diplomacy*, ed.Thomas E. Novorty, Ilona Kickbush dan Michaela Told, New jersey: World Scientific.

Creswell, John W.(2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London:Sage

Drezner, Daniel W. (2020). The Song Remains the Same: International Relations After COVID-19. *International Organizations*. Online Supplement.

Filipovic, Aleksa. (2021). "Vaccine Diplomacy" during COVID-19 global pandemic: The case of Serbia. https://www.researchgate.net/publication/351330363_Vaccine_diplomacy_during_COVID-19_global_pandemic_the_case_of_Serbia . Diakses 1 Mei 2021.

Firdaus, Aos Yuli. (2020). Multi-Track Diplomacy as Indonesia's Strategy in Mitigating The COVID-19 Pandemic. *Journal of Social Political Sciences*. Vol. 1. No. 3.

Hein, Wolfgang. (2013). Instruments of Health Diplomacy. Dalam *Global Health Diplomacy*, ed.Thomas E. Novorty, Ilona Kickbush dan Michaela Told, New jersey: World Scientific.

Hiebert, Murray. (2013). *Indonesia Steps up Global Health Diplomacy: Bolster Role in Addressing International Medical Challenges*. Jakarta:CSIS.

Holmberg, Christine, Stuart Blume and Paul Greenough.(2017). *The Politics of Vaccination: A Global History*. Manchester: Manchester University Press.

Kobierecka, A., & Kobierecki, M. (2021). Coronavirus diplomacy: Chinese medical assistance and its diplomatic implications. *International Politics (The Hague)*, 1 - 18.

Kickbusch, Ilona, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihay Kokeny.(2020). *A Guide to Global Health Diplomacy*. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies.

Kickbush, Ilona, Graham Lister, Michael Told, Nick Drager (Eds).(2013). *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases*. New York: Springer.

Kementerian Luar Negeri. (2018). *Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global*. Jakarta : Kemlu RI.

Lamont, Christopher. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.

Merson, Michael H., Robert E. Black, Anne J. Mills. (2020). *Global Health: Diseases, Programs, System and Policies*. Burlington: Jones&Bartlett Learning.

Panier, Alice. (2020). Bilateral Relations. Dalam Thierry Balzacq, Frederic Charillon and Frederic Ramel. *The Global Diplomacy: An Introduction to Theory*

- and Practice*. Cham: Palgrave Macmillan. Hal 19.
- Petiteville, Franck and Delphie Placidi-Frot. (2020). Multilateral Diplomacy. Dalam Thierry Balzacq, Frederic Charillon and Frederic Ramel. *The Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*. Cham: Palgrave Macmillan
- PJ, Hotez (2014) "Vaccine Diplomacy": *Historical Perspectives and Future Directions*. PLoS Negl Trop Dis 8(6): e2808. doi:10.1371/journal.pntd.0002808.
- Purbantina, Adiasri Putri dan Renitha Dwi Hapsari. (2020). Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan Covid-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia. *Global & Policy* Vol.8. No1. Januari-Juni.
- Sara E., Davies, Adam Kamradt-Scott and Simon Rushton. (2015). *Disease Diplomacy: International Norms and Global Health Security*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Setiawan, Asep. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen*. Vol. 1 No 2.
- Sharun, Khan, Kuldeep Dhama, COVID-19 vaccine diplomacy and equitable access to vaccines amid ongoing pandemic. *Archives of Medical Research*, 2021.
- Verma, Raj. (2020). China's diplomacy and changing the COVID-19 narrative. *International Journal*. 0(0).I-II.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. (2020). Masalah Diplomasi Kesehatan Indonesia di Era Pandemi. *Global Strategis*, Th. 14, No. 2.
- Wangke, Humphrey.(2021). Indonesia's Vaccine Diplomacy for the World health. *Info Singkat*. Research Center Expertise Agency of DPR RI.
- Yeremia, A. & Raditio, K. (2021). VACCINE COOPERATION. In *Minding the Grassroots* (pp. 12-17). Singapore: ISEAS Publishing.
<https://doi.org/10.1355/9789814951159-007>.
- Youde, Jeremy. (2019). China's Role in Global Health Governance. Dalam Richard Parker and Jonathan Garcia (eds). *Routledge Handbook on the Politics of Global Health*. London:Routledge.
- Online**
- India's vaccine diplomacy brings money and influence*. (2021). Emerald Expert Briefings. doi:10.1108/oxan-db260281.
- Prakoso, Agung, Intan Baretta Nur Azizah, Rachmi Hertanti. *Indonesia's COVID-19 Vaccine Diplomacy: The Challenge of Public Access to Equitable Vaccines and Health Care Services*. 22 Desember 2020.
<https://igj.or.id/indonesias-covid-19-vaccine-diplomacy-the-challenge-of-public-access-to-equitable-vaccines-and-healthcare-services/?lang=en>. Akses 1 Mei 2021.
- Indonesia Sukses Loloskan Resolusi PBB Perdana Tentang Solidaritas Global Atasi Covid-19*. Tanggal 4 April 2020.
<https://setkab.go.id/indonesia-sukses-loloskan-resolusi-pbb-perdana-tentang-solidaritas-global-atasi-covid-19/>. Diakses 3 Mei 2021.
- Drajat, Ben Perkasa. *Maintaining Indonesia's Independent and Active Vaccine Diplomacy*, "Jakarta Post, Maret 16, 2021.
- Alunaza, Hardi. (2020). *Diplomasi Vaksin COVID-19 Pemerintah Indonesia*. <https://www.untan.ac.id/diplomasi-vaksin-covid-19-pemerintah-indonesia/>.
- Shania, Mashabi. (2021). *Upaya Pemerintah Peroleh Vaksin COVID-19 Secara Gratis Membuahkan Hasil*. tanggal 9 Maret 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/08475231/upaya-pemerintah-peroleh-vaksin-covid-19-secara-gratis-mulai-membuahkan?page=all>. Diakses 1 Mei 2021.
- Marsudi, Retno. (2021). *Dukung Kesetaraan Vaksin untuk Seluruh Negara*.

<http://www.gprnews.id/books/sndh/#p=20>
. Diakses 1 Juni 2021.

Yuniartha, Lidya.(2021). *Demi Dapatkan Vaksin COVID-19, ini Sederet Upaya Diplomasi yang Dilakukan Menlu Retno*. Tanggal 27 Januari 2021. <https://newssetup.kontan.co.id/news/demi-dapatkan-vaksin-covid-19-ini-sederet-upaya-diplomasi-yang-dilakukan-menlu-retno>. Diakses 1 Mei

Tiga cara Indonesia Dapatkan Vaksin Corona. Tanggal 16 Oktober 2010. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201016133044-106-559204/tiga-cara-indonesia-dapatkan-vaksin-corona>. Diakses 1 Mei 2021.

Vaccine Diplomacy: Indonesia Aims for National, Global Access. Tempo Online 3 Januari 2021. <https://en.tempo.co/read/1419652/vaccine-diplomacy-indonesia-aims-for-national-global-access>.

Indonesia's to get US vaccine donations amid COVID Emergency. Tanggal 3 Juli 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/3/us-to-ship-vaccines-to-indonesia-amid-record-cases-deaths>.

WHO.(2021). *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*. Edition 46. Published 29 June 2021.

WAWANCARA

Duta Besar RI di Austria Dr. Darmansyah Djumala

Direktur Afrika dan Anggota Satgas COVID-19 Kemlu RI Daniel Tumpal Simanjuntak

Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga I Gede Wahyu Wicaksana

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Indonesia Siti Nadia Tarmizi

